

RINGKASAN

Lili Rahmayana Harahap
237410101034
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS
(Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)
Dr. Muhammad Nasir, S.H., L.L.M.
Dr. Sulaiman S. H., M. Hum.

Eksplorasi anak sebagai pengemis merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang semakin memprihatinkan, termasuk di Kota Lhokseumawe. Anak-anak yang dipaksa mengemis mengalami kerugian fisik, psikis, dan sosial, serta kehilangan hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan keluarga, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tidak optimalnya peran negara dalam melindungi anak. Secara hukum, Indonesia telah mengatur perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76I dan Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum yang menegaskan larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak dan ancaman pidana bagi pelakunya. Namun implementasinya masih belum efektif. Banyak kasus eksploitasi anak yang tidak terungkap atau tidak ditindak secara tegas, sehingga menciptakan ruang bebas bagi pelaku eksploitasi. Eksploitasi anak sebagai pengemis bukan hanya soal ekonomi, melainkan kejahatan terhadap masa depan anak. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan menyeluruh, termasuk upaya pencegahan, penindakan hukum, dan rehabilitasi korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Kota Lhokseumawe serta menganalisis bagaimana perlindungan dan upaya hukum yang diberikan dinas sosial terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan pendekatan terhadap undang-undang dan studi kasus, penelitian ini bersifat preskriptif. Sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder, alat pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjuk bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di Kota Lhokseumawe secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I dan Pasal 88. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan tersebut belum optimal. Masih ditemukan kasus anak yang dipaksa mengemis karena lemahnya pengawasan, minimnya penegakan hukum, serta kurangnya peran aktif dari pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, edukasi masyarakat, serta penindakan tegas terhadap pelaku eksploitasi demi menjamin hak-hak anak secara nyata. Faktor penghambat

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya di instansi terkait, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak untuk bekerja di jalan. Faktor-faktor ini menghambat efektivitas pelaksanaan hukum dan perlindungan yang semestinya diterima oleh anak-anak. Upaya yang telah diberikan dinas sosial mencakup peningkatan kesadaran anak-anak itu sendiri mengenai hak-hak mereka. Anak-anak diberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Program pelatihan dan pendidikan bagi anak-anak yang terlibat dalam kegiatan mengemis di jalanan dapat membantu mereka memperoleh keterampilan yang berguna di masa depan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Eksploitasi, Anak*

SUMMARY

Lili Rahmayana Harahap
237410101034
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VICTIMS
OF EXPLOITATION AS BEGGARS
(A Study in Lhokseumawe City)
Dr. Muhammad Nasir, S.H., L.L.M.
Dr. Sulaiman S. H., M. Hum.

Exploitation of children as beggars is a form of violation of children's rights that is increasingly concerning, including in Lhokseumawe City. Children who are forced to beg experience physical, psychological, and social losses, and lose their right to grow and develop properly. This condition shows weak family supervision, lack of public awareness, and the suboptimal role of the state in protecting children. Legally, Indonesia has regulated child protection in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Article 76I and Article 88 of the Child Protection Law are the legal basis that emphasizes the prohibition of economic exploitation of children and the threat of criminal penalties for perpetrators. However, its implementation is still ineffective. Many cases of child exploitation are not revealed or not dealt with firmly, thus creating a free space for perpetrators of exploitation. Exploitation of children as beggars is not only about the economy, but also a crime against the future of children. Therefore, the state is obliged to provide comprehensive protection, including prevention efforts, legal action, and rehabilitation of victims.

This research aims to examine the legal protection for children who are victims of exploitation as beggars in Lhokseumawe City and to analyze the legal measures and protection efforts provided by the Social Services Office (Dinas Sosial) for such children.

This study employs an empirical juridical method with a legal and case study approach. It is prescriptive in nature. Data sources include both primary and secondary data, collected through interviews, documentation, and literature review.

The results of the study indicate that 1) Legal protection for child victims of exploitation in Lhokseumawe City has been normatively regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, especially Article 76I and Article 88. However, in practice, the implementation of this protection has not been optimal. There are still cases of children being forced to beg due to weak supervision, minimal law enforcement, and the lack of active roles from local governments and child protection institutions. This indicates the need for increased coordination, public education, and firm action against perpetrators of exploitation in order to guarantee children's rights in real terms. 2) Inhibiting factors in the implementation of legal protection for child victims of exploitation as beggars in Lhokseumawe City come from low public awareness, limited resources in related agencies, weak coordination between agencies, and family economic conditions that force children to work on the streets. These factors hinder the effectiveness of law enforcement and the protection that children should receive. 3) Efforts that have been made by

the social services include increasing children's awareness of their rights. Children are given an understanding of the importance of education and protection from all forms of exploitation. Training and education programs for children involved in street begging can help them acquire useful skills in the future.

Keywords: Legal Protection, Exploitation, Children